

Normalisasi Kompensasi Jasa Kuli Bongkar: Fenomena Culture Lag dan Strategi Adaptasi Masyarakat Agraris dalam Transisi Menuju Masyarakat Industri

Yordhi Rachmatdian*, Tri Widyanto, Andhre Filsen N, Ovalia

Universitas Bakrie, Indonesia

Email: Yordhir@gmail.com*, tri.widyanto1305@gmail.com, afnaing@outlook.com,

Ovalia.rukmana@bakrie.ac.id

Kata Kunci	Abstrak
industrialisasi; transformasi sosial-ekonomi; pergeseran mata-pencapaian; lembaga lokal; konflik sosial.	Pembangunan industri di Indonesia sejak era Orde Baru melalui Program Pembangunan Lima Tahun (PELITA) telah mendorong transformasi struktural perekonomian nasional, dengan Provinsi Jawa Barat sebagai pusat gravitasi sektor manufaktur. Kedekatan geografis dengan Jakarta menjadikan Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bekasi, mengalami pertumbuhan industri yang sangat pesat, ditandai dengan berkembangnya koridor industri besar, termasuk Kawasan Industri Greenland International Industrial Center (GIIC). Perkembangan ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), namun secara simultan memicu pergeseran mata pencaharian masyarakat dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa, serta menimbulkan dinamika sosial yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pergeseran mata pencaharian masyarakat desa dan perubahan peran lembaga adat/lokal dalam merespons industrialisasi. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Desa Pasir Ranji dan Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industrialisasi mendorong perubahan struktur sosial-ekonomi, melemahkan fungsi tradisional lembaga lokal, serta memunculkan potensi konflik sosial akibat tekanan ekonomi dan keterbatasan adaptasi masyarakat agraris. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan industri yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.
Keywords	Abstract
<i>Industrialisasi, Transformasi sosial-ekonomi, pergeseran mata pencapaian, lembaga lokal, konflik sosial.</i>	<i>Industrial development in Indonesia since the "Orde Baru" era, through the Five-Year Development Program (PELITA) has driven structural transformation of the national economy, with West Java Province emerging as the core of the manufacturing sector. Its geographical proximity to Jakarta has positioned West Java, particularly Bekasi Regency, as a strategic industrial hub characterized by the rapid expansion of large-scale industrial corridors, including the Greenland International Industrial Center (GIIC). While this growth has significantly contributed to regional economic performance, it has simultaneously accelerated the shift of rural livelihoods from agriculture to industrial and service sectors, generating complex social dynamics. This study aims to analyze the process of livelihood transformation at the village level and the evolving roles of local and customary institutions in responding to industrialization. A qualitative descriptive approach with a case study method was employed in Pasir Ranji Village and Sukamahi Village, Cikarang Pusat</i>

District, Bekasi Regency. Data were collected through observation, in-depth interviews, focus group discussions, and document analysis. The findings reveal that industrial expansion has reshaped local socio-economic structures, weakened traditional institutional functions, and increased the potential for social conflict driven by economic pressures and limited adaptive capacity among agrarian communities. These results highlight the importance of inclusive, sustainable, and community-based industrial development policies to ensure balanced socio-economic transformation.



PENDAHULUAN

Kajian mengenai dampak industrialisasi terhadap masyarakat agraris telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Mulyadi (2015) dalam studinya di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, menemukan bahwa industrialisasi mendorong pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor jasa dan industri, namun juga menyebabkan lunturnya rasa solidaritas dan tolong-menolong akibat meningkatnya individualisme. Wathoni (2023) meneliti transformasi sosial masyarakat pedesaan di Jawa Timur dan menyimpulkan bahwa industrialisasi menciptakan ketimpangan ekonomi serta melemahkan institusi lokal. Sementara itu, Priyono dan Nilamsari (2021) serta Titi dkk. (2025) secara spesifik mengkaji fenomena penyalahgunaan wewenang organisasi masyarakat dan praktik premanisme berkedok ormas di wilayah berkembang, termasuk kawasan industri. Nurdin dkk. (2025) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa premanisme politik menciptakan biaya tambahan bagi iklim investasi. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada dampak makro industrialisasi atau fenomena patologis secara umum, dan belum secara khusus menganalisis proses normalisasi kompensasi jasa kuli bongkar sebagai manifestasi *culture lag* dalam transisi masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Penelitian ini menempatkan fenomena tersebut sebagai pintu masuk untuk memahami kegagalan adaptasi struktural dan kultural masyarakat lokal di sekitar kawasan industri.

Pembangunan industri di Indonesia cukup masif terhitung sejak pemerintahan era orde baru dengan Program Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang mendominasi aktivitas industri baik dari segi luasan lahan, jumlah pabrik, maupun nilai produksi. Sebagai provinsi yang geografisnya berdekatan dengan Jakarta, Jawa Barat memiliki peran sentral dan strategis dalam peta industrialisasi nasional Indonesia, bahkan ditetapkan sebagai pusat gravitasi bagi sektor manufaktur (Surya & Arsal, 2024; Kartika Sari, 2023). Perkembangan industri di Jawa Barat tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan pabrik secara kuantitas tetapi juga terlahirnya koridor industri masif yang membentang dari wilayah Bekasi hingga Karawang bahkan perkembangannya mencakup hingga wilayah Subang. Peningkatan ini ditandai oleh meningkatnya pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB) Jawa Barat secara signifikan. Secara simultan, pertumbuhan positif dan signifikan sektor industri manufaktur di Kabupaten/Kota Jawa Barat selama periode 2010–2018 didorong oleh Investasi, Jumlah Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Jumlah Perusahaan Industri, di mana peningkatan Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja mempercepat kinerja industri, membuka lapangan pekerjaan baru, serta secara bertahap menggeser dominasi sektor pertanian di wilayah tersebut, menjadikannya model perbandingan yang relevan untuk menganalisis pemicu dan dampak transisi sosial-ekonomi di tingkat desa (Qushoy dkk., 2022)

Dinamika dari pertumbuhan industri mencapai puncaknya di kawasan khususnya Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi diantaranya Kawasan Industri MM 2100, Kawasan Industri Jababeka, Kawasan Industri Lippo Cikarang, Kawasan Industri Delta Silicon, Kawasan Industri Deltamas. Investasi asing dari Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan Cina mempercepat pertumbuhan kawasan industri di daerah tersebut. Kawasan Industri Greenland International Industrial Center (GIIC) merupakan bagian dari Kota Deltamas yang dikembangkan oleh PT Puradelta Lestari Tbk. dan PT Pembangunan Deltamas dengan luas area pengembangan \pm 2200 hektar membawahi 6 desa diantaranya Desa Cicau, Desa Sukamahi, Desa Pasirranji, Desa Pasirtanjung, Desa Hegarmukti, dan Desa Jayamukti yang berada di bawah Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. GIIC dibangun mulai dari tahun 2008 sebagai bagian dari proyek kota mandiri kerja sama antara Sinar Mas Land dan Sojitz Corporation dari Jepang.

Pertumbuhan sektor industri yang cukup masif di Jawa Barat secara signifikan menggeser dominasi sektor pertanian, hal tersebut menunjukkan adanya perubahan struktur ekonomi di kawasan Jawa Barat (Qushoy dkk., 2022). Perkembangan industrialisasi yang masif telah menimbulkan tantangan kompleks transformasi penggunaan lahan agraris dari sektor pertanian menjadi industri yang berkelanjutan. Menurut Din Syamsudin, Bupati Kabupaten Bekasi sisa luas lahan pertanian di Kecamatan Cikarang Pusat tersisa sekitar 1000 hektar karena sudah dialihfungsikan menjadi kawasan industri. Alih fungsi ini telah menimbulkan dampak antara lain lingkungan, polusi, ketersediaan air bersih, disparitas ekonomi, peningkatan urbanisasi, dan dinamika hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja maupun perusahaan dengan masyarakat sekitar kawasan industri. Tantangan lainnya adalah ketidakmampuan masyarakat sektor agraris mengikuti perkembangan industri sehingga diberdayakan menjadi kuli bongkar untuk terlibat dalam aktivitas industri khususnya jasa konstruksi. Namun pada faktanya praktik tersebut menjadi problematik di kalangan para penggiat usaha jasa konstruksi karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan proses bisnis dari jenis usaha jasa konstruksi tersebut (Murni Widayanti et al., 2024; Nain et al., 2025).

Konflik antar organisasi masyarakat maupun paguyuban sering kali dilatarbelakangi oleh perebutan lahan penghasilan ilegal, yang menunjukkan adanya tekanan ekonomi sebagai akar masalah (Handayanu, 2032; Surya & Aرسال, 2024; Utomo, 2018). Fenomena penyalahgunaan wewenang oleh oknum organisasi berdampak pada labeling negatif dari masyarakat (Priyono & Nilamsari, 2021). Kebutuhan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai keberlanjutan sosial dan ekonomi, dan lingkungan di sektor agraris mulai dari sinergi antara tradisi lokal dan inovasi modern guna melindungi petani kecil dari dampak negatif kapitalisme global (Simanullang dkk., 2024) Perubahan sosial yang terjadi di daerah industri melibatkan pergeseran fungsi lahan memicu konflik dan ketegangan di antara warga. Dampak kemajuan teknologi modern dalam industrialisasi menimbulkan kemunduran salah satunya adalah luntarnya rasa saling tolong menolong di antara anggota keluarga karena semakin individualistik (Mulyadi, 2015).

Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan pemerintah dan kesenjangan ekonomi menjadi akar masalah muncul praktik premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) di wilayah yang sedang berkembang (Titi dkk., 2025). Dalam konteks wilayah industri, premanisme politik memperlemah daya saing dengan menciptakan biaya tambahan berupa pungutan liar dan intimidasi. Keterlibatan kelompok informal ini sering kali didorong oleh jaringan patronasi politik yang mengakar kuat (Nurdin dkk., 2025).

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. *Pertama*, penelitian ini mengkaji secara spesifik fenomena normalisasi kompensasi jasa kuli bongkar sebagai bentuk adaptasi semu masyarakat agraris yang gagal bersaing di sektor industri formal. Praktik ini tidak lagi dipahami sebagai kerja produktif, melainkan sebagai kompensasi yang dilembagakan secara informal dan cenderung dipaksakan, yang merepresentasikan distorsi hubungan industrial di tingkat lokal. *Kedua*, penelitian ini mengintegrasikan kerangka teori *culture lag* dari William F. Ogburn dengan teori solidaritas Émile Durkheim untuk menjelaskan ketimpangan antara perubahan material (transformasi lahan dan teknologi industri) dan adaptasi non-material (kompetensi, norma, kelembagaan lokal) pada masyarakat desa di kawasan industri. *Ketiga*, penelitian ini dilakukan di wilayah yang selama ini jarang menjadi locus studi, yaitu Desa Pasir Ranji dan Desa Sukamahi di Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, yang merupakan bagian dari Kawasan Industri Greenland International Industrial Center (GIIC). Pendekatan studi kasus komparatif antar desa dalam satu kawasan industri memberikan kedalaman analisis terhadap dinamika sosial-ekonomi yang bersifat kontekstual sekaligus potensial untuk direplikasi di kawasan industri lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pergeseran mata pencaharian masyarakat Desa Pasir Ranji dan Desa Sukamahi dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa sebagai dampak industrialisasi di Kawasan GIIC, mengidentifikasi perubahan peran dan fungsi lembaga lokal dalam merespons transformasi sosial-ekonomi di wilayah penelitian, menganalisis fenomena normalisasi kompensasi jasa kuli bongkar sebagai manifestasi culture lag dalam transisi masyarakat agraris menuju masyarakat industri, serta mengkaji potensi konflik sosial yang muncul akibat tekanan ekonomi dan keterbatasan adaptasi masyarakat lokal guna merumuskan strategi adaptasi yang inklusif dan berkelanjutan (Novar et al., 2021; Kamaruddin, 2024). Adapun manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoretis berupa pengayaan kajian sosiologi pembangunan dan sosiologi industri, khususnya dalam penerapan teori culture lag dan teori solidaritas Durkheim pada konteks industrialisasi di Indonesia serta pengembangan konsep adaptasi masyarakat agraris dalam transisi menuju masyarakat industri; manfaat praktis berupa masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dan Kecamatan Cikarang Pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan industri yang inklusif dan berbasis pemberdayaan masyarakat lokal serta bahan evaluasi bagi pengelola kawasan industri dalam merancang program tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih responsif; dan manfaat sosial berupa peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya adaptasi berkelanjutan di tengah arus industrialisasi serta penguatan peran lembaga lokal sebagai mediator sosial dalam resolusi konflik (Amalia et al., 2020).

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis maupun praktis. Secara teoretis, temuan penelitian menegaskan bahwa *culture lag* tidak hanya terjadi pada tataran teknologi dan institusi, tetapi juga merambah pada ranah praktik ekonomi informal yang terlegitimasi secara lokal. Normalisasi kompensasi jasa kuli bongkar menunjukkan bahwa ketertinggalan budaya dapat melahirkan bentuk-bentuk adaptasi distortif yang justru memperkuat eksklusi sosial dan menghambat mobilitas vertikal masyarakat lokal. Hal ini memperluas pemaknaan teori *culture lag* dalam konteks hubungan industrial di negara berkembang. Secara praktis, penelitian ini mengimplikasikan perlunya kebijakan pembangunan industri yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas adaptif masyarakat lokal. Program pemberdayaan masyarakat perlu dirancang secara partisipatif dan berkelanjutan, tidak lagi bersifat karitatif atau seremonial. Selain itu, diperlukan penguatan peran lembaga lokal, baik formal maupun informal, sebagai jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku

industri. Manajemen konflik yang kolaboratif dan inklusif menjadi prasyarat penting untuk menjaga stabilitas sosial di kawasan industri. Dalam jangka panjang, integrasi kebijakan industrialisasi dengan prinsip keberlanjutan sosial dan ekonomi akan menentukan keberhasilan transformasi struktural yang adil dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus di Desa Pasir Ranji dan Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi untuk menganalisis dampak industrialisasi yang menciptakan perubahan sosial serta manajemen konflik selama proses transformasi Masyarakat.

Penelitian meliputi aktivitas observasi, wawancara, FGD, dan studi data sekunder. Wawancara mendalam (In-depth Interviews) dengan pemangku kepentingan utama seperti tokoh masyarakat, aparat desa, dan perwakilan dari Estate Management. Sedangkan untuk studi dokumen berasal dari data demografi Desa Pasir Ranji dan Sukamahi, serta annual report pengelola Kawasan dan data statistik Cikarang Pusat dari Badan Pusat Statistik.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, penginterpretasi, sekaligus pelapor hasil penelitian. Pendekatan kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci karena mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang kompleks dan dinamis di lapangan. Untuk mendukung sistematika dan kedalaman pengumpulan data, digunakan instrumen bantu berupa:

1. Pedoman wawancara mendalam disusun berdasarkan isu-isu pokok penelitian, seperti pergeseran mata pencaharian, peran lembaga lokal, praktik kompensasi kuli bongkar, dan respons masyarakat terhadap industrialisasi.
2. Panduan observasi digunakan untuk mengamati aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, interaksi antar aktor di lingkungan industri, dan praktik kerja kuli bongkar di proyek konstruksi.
3. Panduan Focus Group Discussion (FGD) memuat topik diskusi yang dirancang untuk menggali dinamika kolektif antar pemangku kepentingan.
4. Catatan lapangan dan alat perekam digunakan untuk mendokumentasikan data verbal dan non-verbal selama proses pengumpulan data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tematik dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kondensasi data dilakukan melalui proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam ringkasan tematik berdasarkan kategori-kategori seperti pergeseran pekerjaan, fungsi lembaga lokal, praktik kompensasi, dan konflik sosial. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, dan kutipan langsung hasil wawancara untuk memperlihatkan pola-pola temuan secara sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif sejak awal pengumpulan data, di mana kesimpulan awal bersifat tentatif dan diverifikasi melalui penggalan data lanjutan di lapangan, diskusi antarpeleliti, serta konfirmasi dengan informan kunci.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki posisi dan kepentingan berbeda, meliputi masyarakat lokal seperti mantan petani, kuli bongkar, dan ibu rumah tangga; aparat desa seperti Sekretaris Desa

dan Kepala Dusun; perwakilan pengelola kawasan industri dari Estate Management; serta akademisi atau pengamat kebijakan industrialisasi. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti membandingkan hasil wawancara mendalam dengan hasil observasi lapangan, membandingkan temuan FGD dengan dokumen resmi desa dan laporan perusahaan, serta membandingkan data statistik dengan narasi hasil wawancara. Melalui triangulasi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang kredibel, mendalam, dan mencerminkan kompleksitas realitas sosial masyarakat di kawasan industri Cikarang Pusat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Pasirranji

Secara administrasi Desa Pasirranji masuk wilayah administrasi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dengan luas total wilayah sekitar 936 hektar. Lokasi Desa Pasirranji saat ini berada di antara Kawasan GIIC. Hal ini sesuai dengan data tata guna lahan di Desa Pasirranji yang didominasi lahan industri seluas 750 hektar.

Tabel 1. Penggunaan Lahan di Desa Pasir Ranji

No	Jenis Lahan	Luas Lahan (Ha)
1	Permukiman	150
2	Pertanian Darat	2
3	Sawah	4
4	Industri	750
5	Industri Kecil	1
6	Pemukaman	2.5
7	TKD	8
8	Fasilitas Umum / Sosial	4

Sumber: Data Desa Pasirranji Tahun 2021

Laporan Data Desa Pasirranji tahun 2021, mencatat terdapat 3 dusun yang ada di Desa Pasirranji, dengan total jumlah penduduk 3444 orang. Dusun I berjumlah 1739 orang, Dusun II berjumlah 742 orang dan Dusun III berjumlah 963 orang. Persentase jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 47% dari jumlah penduduk, sementara perempuan sebesar 53%.

Tingkat pendidikan formal masyarakat Desa Pasirranji relatif rendah didominasi oleh tamat SD dan SLTP. Laporan Data Desa Pasirranji 2021 menunjukkan setengah lebih penduduk Desa Pasirranji tidak menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SLTP (Tabel 2). Mayoritas belum tamat SD dengan jumlah 1445 orang diikuti belum tamat SLTP dengan 945 orang.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pasir Ranji Tahun 2021

No	Kategori Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Belum Tamat SD	1.445
2	Belum Tamat SLTP	945
3	Tamat SD	321
4	Tamat SLTP	257
5	Tamat SLTA	192
6	Diploma	12

No	Kategori Pendidikan	Jumlah (Orang)
7	Sarjana (S1)	15
8	Pascasarjana (S2/S3)	3

Sumber: Data Desa Pasir Ranji Tahun 2021

Kualitas sumber daya manusia ini relevan dengan komposisi mata pencaharian masyarakatnya yang didominasi oleh mata pencaharian non formal. Laporan Data Desa Pasirranji 2021 menunjukkan jenis mata pencaharian yang mendominasi adalah pedagang dan buruh harian lepas (Tabel 3).

Tabel 3. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pasir Ranji Tahun 2021

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani	30
2	Pedagang	500
3	Peternak	5
4	Karyawan	289
5	Bengkel	25
6	Jasa	30
7	Buruh Harian Lepas	420
8	Bidan / Perawat	3
9	PNS	30
10	TNI / POLRI	2

Sumber: Data Desa Pasirranji Tahun 2021

Kelembagaan desa merupakan wadah penting bagi masyarakat yang memegang peranan vital sebagai motor dari partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan tata kelola desa yang inklusif. Melalui berbagai organisasi yang ada, masyarakat Desa Pasirranji memiliki wadah untuk berinteraksi secara terorganisir untuk mencapai tujuan pembangunan desa, seperti halnya rincian pada tabel 4

Tabel 4. Kelembagaan di Desa Pasir Ranji

No	Jenis Organisasi / Kelembagaan	Jumlah Anggota
1	BPD	7 orang
2	LPM	6 orang
3	Majelis Talim	8 kelompok
4	PKK & Kader PKK	21 orang
5	Linmas	10 orang
6	Karang Taruna	12 orang
7	Bumdes	1 orang
8	Posyandu	5 titik
9	Pustu	1 titik
10	Koperasi	Tidak Ada
11	Kelompok Tani	5 kelompok
12	Gapoktan	Tidak Ada
13	LSM	Tidak Ada
14	DKM	6 kelompok
15	Yayasan	1 unit

No	Jenis Organisasi / Kelembagaan	Jumlah Anggota
16	Rukun Warga	8 RW
17	Rukun Tetangga	19 RT
18	Partai Politik	Tidak Ada
19	Kelompok Arisan	5 kelompok
20	Kelompok Senam	1 kelompok

Sumber: Data primer, hasil dokumentasi desa (2025).

Kelembagaan yang ada di Desa Pasirranji tahun 2021 didukung oleh struktur pemerintahan desa yang lengkap meliputi BPD, LPM, dan lembaga koordinasi kewilayahan yaitu RT dan RW. Kelembagaan sosial dan pemberdayaan seperti PKK, Karang Taruna, dan Linmas merupakan komponen yang penting di desa. Lembaga berbasis keagamaan dan minat memiliki peran yang kuat di masyarakat tercermin dengan keberadaan Majelis Talim dan kelompok arisan. Pada sektor kelembagaan kesehatan dan ekonomi terdapat posyandu dan pustu, namun kenyataan di lapangan, masyarakat Desa Pasirranji lebih memilih pelayanan Puskesmas Desa Sukamahi dikarenakan belum tersedianya layanan Puskesmas di Desa Pasirranji.

Ketersediaan sarana dan prasarana umum merupakan indikator dalam mengukur tingkat pelayanan publik serta kualitas hidup masyarakat di desa tersebut. Laporan Data Desa Pasirranji menunjukkan keberadaan fasilitas umum mulai dari sektor pendidikan, keagamaan, hingga sarana olahraga sudah tersedia (Tabel 5). Fasilitas umum yang ada di Desa Pasirranji didominasi oleh fasilitas umum keagamaan dengan total 17 unit yang mana semuanya merupakan tempat ibadah umat Islam. Sedangkan aksesibilitas terhadap pendidikan terdiri secara berjenjang dari tingkat usia dini hingga menengah atas. Aksesibilitas pendidikan tidak hanya pendidikan formal namun juga pendidikan keagamaan seperti TPA, Madrasah Diniyah, dan Pesantren. Selain itu ruang publik sebagai arena penunjang kebugaran fisik dan kesehatan warga.

Tahun 2003 Desa Pasirranji didominasi oleh lahan hijau dimana masyarakatnya masih bekerja di sektor pertanian sawah tadah hujan dengan berbagai macam komoditas yang dihasilkan serta peternakan hewan. Kontur tanah di desa ini juga seperti perbukitan hal tersebut dijelaskan oleh salah satu anggota kepolisian yang bertugas menjadi pengaman pada saat proses pembebasan lahan dan cut and field lahan di Desa Pasirranji hal tersebut juga dikuatkan oleh salah satu Sekretaris Desa Pasirranji :

“jaman aku jagain babat alas disini mas bener bener tempat jin buang anak gak ada orang kebun dan sawah nyampur bentuknya juga perbukitan naik turun makanya sama pihak kawasan diratakan menggunakan eskavator nah aku jaman itu jagain eksavator biar gak dimaling spare partnya sampai pagi hari”.

“masyarakat disini dulu sebelum pembebasan lahan masih bekerja sebagai petani dengan berbagai macam komoditas meskipun sawah tidak cukup produktif karena tanah disini kurang baik dan sumber air juga susah jadi hanya mengandalkan curah hujan”

Memahami transformasi sosial dan ekonomi yang terjadi pada masyarakat Desa Pasir Ranji dari masyarakat agraris menjadi bagian dari integrasi dari industri besar di Kabupaten Bekasi, jika dilihat dari pendekatan teori perubahan Durkheim dan Ogburn. Dalam pendekatan analisis Durkheim perubahan sosial sebagai transisi dari satu tipe solidaritas sosial mekanik

menjadi solidaritas organik hal tersebut dibuktikan meningkatnya pembagian kerja (Spesialisasi). Dimana masyarakat sebelum Industrialisasi sekitar tahun 2003 didominasi oleh lahan pertanian maupun ladang yang mencerminkan masyarakat agraris dengan ciri kehidupan dan pekerjaan seragam sebagai petani menciptakan kesadaran kolektif yang kuat, ikatan sosial yang kaku, dan homogenitas segmen sosial. Lembaga sosial seperti tokoh masyarakat cenderung bersifat integral dalam menjaga nilai, norma, dan budaya bersama. Proses transisi yang masif pada lahan pertanian dan ladang milik masyarakat oleh pengembang menghilangkan basis ekonomi kolektif tersebut. Masyarakat didorong beralih mata pencaharian ke sektor yang teridentifikasi pegagang, karyawan, jasa buruh harian lepas atau kuli bongkar sebagai representatif dari meningkatnya pembagian kerja menuju Solidaritas Organik. Dimana masyarakat menjadi individualistis dari luntarnya rasa tolong-menolong dan saling bergantung pada spesialisasi pekerjaan yang berbeda bukan dari homogenitas. Transisi cepat dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri melahirkan anomie (kekosongan norma) di tingkat Desa. Fungsi tradisional lembaga lokal melemah dan ketegangan sosial yang menimbulkan friksi sosial lahir lahir dari sistem norma lama tidak memadai untuk mengelola kompleksitas struktur ekonomi baru. Konflik sosial dan praktik penghasilan ilegal dan premanisme berkedok kuli bongkar adalah manifestasi dari kegagalan masyarakat dan lembaga lokal dalam membangun sistem regulasi dan ikatan moral baru yang adaptif dengan solidaritas organik masyarakat Industri.

Perubahan sosial yang cepat dan masif dari transformasi lahan dalam waktu 11 tahun adalah contoh perubahan secara material yang disruptif yang memunculkan peluang ekonomi baru mulai dari tahap pembangunan hingga operasional seperti munculnya industri manufaktur, FMCG dan data center. Perubahan material secara cepat ini tidak diimbangi oleh adaptasi kebudayaan non material yang memadai. Kualitas sumber daya manusia dimana mayoritas penduduk Desa Pasir Ranji memiliki tingkat pendidikan formal yang relatif rendah jika dibandingkan dengan kesenjangan antara permintaan industri modern dan kompetensi SDM lokal menciptakan ketertinggalan budaya.

Ketidakmampuan bersaing secara formal di sektor industri akhirnya sebagian besar masyarakat agraris teralienasi ke arah pekerja sektor informal seperti buruh harian lepas yang secara spesifik kuli bongkar di proyek-proyek konstruksi. Normalisasi kuli bongkar pada era saat ini sebagai bentuk dari Culture Lag dimana awalnya konsep pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu mengejar kebutuhan SDM Industri sebagai peran CSR dari pihak pengembang justru menjadi problematika dan bahkan normalisasi dalam proses bisnis jasa konstruksi kuli bongkar tidak lagi bekerja melainkan diberikan kompensasi yang sudah berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama. Praktik ini adalah manifestasi dari culture lag dimana struktur material industri baru (proyek konstruksi) menciptakan ceruk ekonomi, namun masyarakat non material yaitu masyarakat lokal gagal beradaptasi ke sektor formal sehingga terjebak dalam pekerjaan informal (kuli bongkar) yang berpotensi konflik dengan perusahaan jasa konstruksi.

KESIMPULAN

Perkembangan industrialisasi yang pesat di Kabupaten Bekasi, khususnya di sekitar Kawasan Industri Greenland International Industrial Center (GIIC), telah mendorong perubahan struktural yang signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa tidak hanya berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan sosial, termasuk melemahnya fungsi lembaga lokal, meningkatnya ketimpangan ekonomi, serta potensi konflik sosial antar individu dan kelompok masyarakat. Konflik tersebut dipicu oleh tekanan ekonomi, keterbatasan kemampuan adaptasi masyarakat agraris, serta lemahnya tata kelola dan pengawasan terhadap interaksi antara perusahaan, masyarakat, dan aktor informal. Fenomena normalisasi kompensasi jasa kuli bongkar adalah produk dari transisi sosial di kawasan industri yang tidak hanya ada pada masyarakat Desa Pasir Ranji melainkan lima Desa lainnya masuk secara administrasi menjadi bagian dari kawasan Green Land International Industri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons tanggung jawab sosial perusahaan dan upaya pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat terdampak, bahkan dalam beberapa kasus memunculkan gesekan baru dalam sektor jasa konstruksi dan hubungan industrial. Penelitian ini bermanfaat untuk pengelolaan konflik sosial di wilayah industri, diperlukan pendekatan manajemen yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan memperkuat peran lembaga lokal sebagai mediator sosial. Integrasi kebijakan pembangunan industri dengan prinsip keberlanjutan sosial dan ekonomi menjadi prasyarat utama untuk menciptakan stabilitas sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar kawasan industri. Keterbatasan Penelitian ini, Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena normalisasi kompensasi jasa kuli bongkar sebagai manifestasi culture lag di kawasan industri, namun diharapkan penelitian mendatang dapat melakukan Studi Komparatif antar kawasan industri (misalnya membandingkan GIIC dengan kawasan industri di Karawang) guna memperluas generalisasi teori Culture Lag dalam konteks hubungan industrial di Indonesia.

REFERENSI

- Amalia, D. R., Alfitri, & Yunindyawati. (2020). Solidaritas di antara pengrajin songket: Suatu tinjauan terhadap teori solidaritas Emile Durkheim di Desa Muara Penimbung, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Empirika*, 5, 59–68. <https://doi.org/10.47753/je.v5i1.90>
- Handyanu, D. (2032). *Analisis konflik lahan antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi*. Universitas Jambi.
- Kamaruddin, S. A. (2024). Dampak pembangunan industri di pedesaan. *AKSILOGI: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5, 362–375. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i2.2831>
- Kartika Sari, A. (2023). Perubahan sosial masyarakat Desa Raya Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 1(1), 19–27. <https://doi.org/10.62238/jupsi.v1i1.95>
- Manullang, S. O., et al. (2024). Sustainable rural development in the era of industrial expansion. *Journal of Sustainable Development Studies*, 15(2), 101–115.
- Mulyadi, M. (2015). Perubahan sosial masyarakat agraris ke masyarakat industri dalam pembangunan masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Jurnal Bina Praja*, 7(4), 311–321. <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.311-321>
- Murni Widayanti, Firdaus, M., & Anisa, Y. (2024). Strategi komunikasi organisasi kemasyarakatan (ORMAS) dalam mengelola konflik internal. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 21(3), 308.

- Nain, U., Faisal, M., Amin, N. I., & Nahrudin, Z. (2025). The impact of modernization on social change in rural communities in South Sulawesi, Indonesia. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 10(2), 611–619. <https://doi.org/10.64753/jcasc.v10i2.1657>
- Novar, S. S., Elfemi, N., & Akbar, W. K. (2021). Dampak industrialisasi pedesaan dalam ketahanan sosial masyarakat Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 6017–6023. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.1902>
- Nuridin, A., Sartika, N. S., Dasmaran, V., & Nurbani, S. (2025). Preman politik dan pasar: Ancaman keamanan terhadap iklim investasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(2), 354–369. <https://doi.org/10.29103/jspm.v6i2.21933>
- Priyono, D. P., & Nilamsari, W. (2021). Penyalahgunaan hak dan wewenang organisasi masyarakat di Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan, Banten. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 253–269. <https://doi.org/10.38043/jids.v5i2.3181>
- Qushoy, L. N., Murniati, N., & Marzan, J. (2022). Determinan pertumbuhan sektor industri Jawa Barat (Studi pada 10 kabupaten/kota). *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(2), 89–96. <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i2.31>
- Simanullang, Y. S., Butar Butar, J. A., Simanjuntak, M., Pakpahan, D. br., Hutasoit, S. M., & Purnamasari, I. (2024). Dinamika perubahan sosial dalam masyarakat agraris. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1, 4108–4117. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Surya, A. Y. A., & Arsal, T. (2024). Transformasi masyarakat agraris ke industri (Studi sosiologis pada petani di Dusun Ngadiwongso, Desa Kabunan, Kecamatan Sukorejo). *Jurnal Dinamika*, 5(2), 105–123. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v5i2.105-123>
- Titi, S., Fahrian, Y., & Agustian, S. (2025). Pertanggungjawaban pidana dalam praktik premanisme dengan modus ormas dalam tindak pidana pemerasan menurut Pasal 368 KUHP. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(2), 385–388. <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i2.9508>
- Utomo, A. W. (2018). Transisi agraris ke industri (Studi sosiologis perubahan sosial: Transisi masyarakat agraris ke industri di Dusun Timang, Desa Wonokerto, Kabupaten Wonogiri). *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 7(2), 205–230.
- Wathoni, S. (2023). Transformasi sosial di pedesaan: Dampak industrialisasi terhadap kehidupan masyarakat lokal. *Al Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 3, 174–183. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v3i2.4648>